



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2021**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang secara sistematis dan berkesinambungan. Aspek yang perlu dicermati berupa potensi, peluang dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul. Keseluruhan proses ini akan menghasilkan suatu strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta aturan keberhasilan dalam kegagalan dalam pelaksanaan.

Penyajian RENJA SKPD ini kami rasa masih jauh dari sempurna, namun paling tidak dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya dan dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikan penyusunan RENJA SKPD ini.

Kota Baru, Februari 2020
KEPALA DINAS

ZULFAHMI, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	Ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKBP3A TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2015 Dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	36
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV. PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja masing-masing SKPD.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020 pada dasarnya adalah pengkomunikasian Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan selama kurun waktu tersebut. Rencana Kerja DPPKBP3A memuat program dan kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan

dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sebagai penjabaran dari RPJMD dan renstra SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing SKPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub didalam indikator kinerja pada RPJMD. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:



Dasar hukum penyusunan dokumen ini mengacu kepada beberapa produk perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok 2010-2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

1.3.Maksud dan Tujuan

Isu-isu strategis yang berkaitan/selaras dengan Program Kependudukan dan KB antara lain :Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan Pencapaian Target MDGs. Berkaitan dengan hal tersebut serta berdasarkan Indikator dan Target Kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2021 yang akan datang maka DPPKBP3A Kabupaten Solok sebagai institusi yang mengemban tugas menyukseskan program KB dan Kependudukan perlu menyelaraskan Visi dan Misinya dengan setidaknya mempertimbangkan tiga hal : **Pertama**, pasca disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka DPPKBP3A Kabupaten Solok tidak lagi diamanatkan sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah kependudukan. **Kedua**, dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan nasional di Kabupaten Solok dipandang perlu disusun perencanaan penganggaran yang responsive gender. **Ketiga** : Dalam rangka pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD maka dalam setiap pelaksanaan RENJA Tahunan DPPKBP3A, dimaksudkan untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok sekaligus starting point sebagai dasar pijakan dan berguna sebagai bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, penyusunan Renja ini dilakukan dengan memperhatikan capaian hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, isu strategis, sinergitas antar urusan, antar wilayah serta lintas sektor, lintas SKPD, serta kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD dalam kerangka pencapaian Visi Kabupaten Solok : **"MAMBANGKIK BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT"**. DPPKBP3A Kabupaten Solok merupakan pengejawantahan mandat yang diberikan untuk melaksanakan pengendalian

penduduk dan menyelenggarakan Program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan KB PP mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan Daerah, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.

Penyusunan Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Renja DPPKBP3A Tahun 2020 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2021 ini harus menampung dan mempunyai kemampuan dalam mewujudkan sasaran pembangunan kependudukan dan KB sekaligus menjadi program prioritas di Kabupaten Solok.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok Tahun 2021 pada dasarnya adalah pengkomunikasian Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok di bidang Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan selama kurun waktu tersebut. Penyusunan RENJA ini dimulai dengan menjelaskan Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran serta Dasar Hukum. Selanjutnya

menjelaskan gambaran umum/Profil SKPD, Data Sasaran dan Capaian Kinerja SKPD tahun sebelumnya. Pada Bab-bab selanjutnya akan membahas tentang Isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dijalankan SKPD DPPKBP3A, uraian matrik program dan kegiatan yang disandingkan Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD. Dengan demikian penyajian RENJA Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
	Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
	Menjelaskan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021.
BAB V	PENUTUP
	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKBP3A TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai Rencana Strategis

(RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPPKBP3A Kabupaten Solok yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPPKBP3A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi, misi tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahunnya. Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2020 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DPPKBP3A Tahun 2019 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan visi dan misi DPPKBP3A Kabupaten Solok, DPPKBP3A pada Tahun 2020 telah merencanakan dan melaksanakan 10 Program dan 22 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPPKBP3A Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL . II.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan)* Kabupaten Solok

Nama SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Volume/ Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Rekapitulasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
											Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10=(6+7)	11=(10/4)
1	02	08	01	01		Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran dengan baik								
1	02	08	01	01	01	Penyediaan Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1

1	02	08	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	02	08	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prsarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Sarana dan Prsarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prsarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM							-	
1	02	08	01	05	07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku							-	
1	02	08	01	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Monev Kegiatan DPPKBP3A Yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	100	1
1	02	08	01	06	09	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01			Program Penyusunan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian SPM dan SOP	Jumlah SPM dan SOP yang disusun							-	
1	02	01				Penyusunan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian SPM dan SOP	Persentase Kepuasan Publik/ Aparatur terhadap pelayanan dan pengelolaan adminitrasi di setiap SKPD	%	100	100	100	100	1	200	1
1	02	08	01	15		Program Keluarga Berencana									
1	02	08	01	15	02	Pelayanan KIE	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	15	07	Jambore Institusi Masyarakat	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	400	400	100	100	1	400	1
1	02	08	01	15	07	Penilaian dan Penghargaan Untuk Institusi Masyarakat Pengelola KB dan Kelompok Kegiatan	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	200	200	-	-	-	200	1
2	02	08	01	16		Pembinaan Tenaga Pendukung Pelaksana Operasional POSDAYA di Kecamatan	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	100	1

1	02	08	01	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja								-	
1	02	08	01	16	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	16	02	Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100	100	-	-	-	100	1
1	02	08	01	16	05	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Reproduksi Remaja	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja	%	200	200	-	-	-	200	1
1	02	08	01	17		Program Pelayanan Kontrasepsi								-	
1	02	08	01	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	Persentase Pelayanan Kontrasepsi	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	18		Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri								-	
1	02	08	01	18	01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	18	02	Pendataan Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	19		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat								-	
1	02	08	01	18	02	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	100	1
1	02	08	01	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR									
1	02	08	01	20	02	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan	%	400	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	20	04	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS									
1	02	08	01	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase Penyuluhan Narkoba, PMS HIV/AIDS Yang Dilaksanakan	%	200	200	-	-	-	200	1
1	02	08	01	23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan								-	
1	02	08	01	23	01	Pelatihan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan	Persentase Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1

1	02	08	01	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan								-	
1	02	08	01	15	02	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	15	03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								-	
1	02	08	01	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	16	10	Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	200	200	-	-	-	200	1
1	02	08	01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								-	
1	02	08	01	17	01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah	Persentase Perempuan dan Anak yang Terlindungi	%	400	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	17	08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak yang Terlindungi	%	200	200	100	100	1	500	1
1	02	08	01	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan								-	
1	02	08	01	18	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Persentase Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan	%	500	400	100	100	1	500	2
1	02	08	01	18	03	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Persentase Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan	%	400	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	18	07	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan	%	400	400	100	100	1	500	1

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja SKPD pada tahun 2019 mencapai 100%, akan tetapi jika dilihat dari tingkat capaian realisasi target Renstra masih ada program dan kegiatan yang realisasinya harus ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dimaklumi karena ini merupakan capaian kinerja SKPD sampai dengan tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan Renstra SKPD. Meskipun demikian dari analisis awal pada pelaksanaan Renstra tahun berjalan s/d 2018 dapat diketahui beberapa penyebab masih rendahnya capaian kinerja DPPKBP3A tersebut. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sebagaimana tabel di atas adalah sebagai berikut :

- Rendahnya capaian kinerja dari target ini disebabkan karena tidak ada program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD daerah yang dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ini, karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/ yang dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih tinggi.
- Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang disebabkan adanya kebijakan *zero growth* terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 15 tahun (1996-sekarang). Selanjutnya Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di tingkat Kabupaten.
- Belum sinkronnya kebijakan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, secara tegas memberi perintah pada Pemerintah Daerah untuk mengambil

peran yang signifikan. Pasal 3 UU itu menyebutkan bahwa kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan yang dijalankan dengan partisipasi semua pihak secara gotong royong. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai amanat Undang-undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program KB di Kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas PPKB dan P3A harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah.
- Masih rendahnya kapasitas Institusi KB di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Nagari (PPKBN) dan Sub-PPKBN, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Perencanaan pelayanan SKPD DPPKBP3A Tahun 2018 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Solok saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan

dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan Tahun 2019 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok memiliki dua acuan yaitu ; 1. Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010, dan 2. Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor : 01 Tahun 2010. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir

TABEL 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SPM / Standar Nasional	IKK	Volum e/ Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi				Catat an	
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019		2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	8	9	9	12	13	14	9	9	16
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase SPM dan SOP yang disusun			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepuasan Publik/ Aparatur terhadap pelayanan dan pengelolaan adminitrasi di setiap SKPD			%	-	≥80	-	-	-	-	≥80	-	-	-	-	≥80	-	-	-	
8	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Kesehatan Rerpduksi Remaja			%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	
15	Persentase Pelayanan Kontrasepsi			%	100	100-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	
21	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan			%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	
22	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

23	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan			%	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	
25	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	
26	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak			%	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	
29	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan			%	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Tinjauan terhadap Sinergitas Program

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

Ada perubahan signifikan terkait visi misi program KB pasca pemberlakuan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disahkan di Jakarta oleh Presiden RI, 29 Oktober 2009 lalu. Perubahan dimaksud adalah perubahan visi dan misi program KB dari "Seluruh Keluarga Ikut KB" dan "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera" menjadi **"Penduduk Tumbuh Seimbang 2017"** dan **"Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera"**. Terkait dengan visi misi tersebut, tampak sekali bahwa ada upaya sinergitas pembangunan program KB dengan pembangunan kependudukan yang belakangan ini tidak tertangani secara baik karena tidak adanya lembaga yang menangani masalah penduduk.

Melalui visi Penduduk Tumbuh Seimbang 2015, pemerintah berkeinginan mengendalikan kuantitas penduduk yang saat ini dirasa

sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2017, Indonesia tidak hanya menduduki ranking empat dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 1,49 persen per tahun atau dalam hitungan absolut terdapat penambahan sekitar 4 juta jiwa per tahun yang kurang lebih setara dengan jumlah penduduk Singapura pada saat ini. Keinginan ini ditandai dengan penetapan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Renstra Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Tahun 2010-2014, yakni terkendalinya jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang ditandai *Total Fertility Rate* (TFR) = 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1.

Sudah barang tentu perhatian pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas penduduk saja, tetapi juga menyangkut kualitas. Hal ini tercermin dari salah satu misi pembangunan KB saat ini yakni mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang saat ini belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Pembangunan berwawasan kependudukan sendiri memiliki dua makna. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek pembangunan. Artinya pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Dengan demikian, dalam pembangunan berwawasan kependudukan akan menempatkan penduduk sebagai fokus dari upaya pembangunan sekaligus mendorong partisipasi penduduk dalam pembangunan yang berlandaskan asas kebersamaan dan gotong royong.

Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara ekonomi masuk akal. Mengarusutamakan masalah-masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika gender.

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional penting yang menganut prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah untuk 2004-2009 mengidentifikasi pengarusutamaan gender sebagai target di bawah tema Membangun Indonesia yang Adil dan Demokratis. Instrumen-instrumen pengarusutamaan gender termasuk Instruksi Presiden yang dikeluarkan tahun 2000 dan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk pengarusutamaan gender yang diterbitkan tahun 2002. Pencapaian telah terlihat, termasuk penyusunan statistik data terpilah di beberapa propinsi, kabupaten dan kecamatan, penerapan Alur Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) di beberapa kementerian, serta peningkatan permasalahan gender yang dicakup ke dalam rencana pembangunan tahunan pada tingkat kabupaten. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dilakukan. Masih sering terdapat kekurangpahaman yang mendasar atas manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program. Masalah gender masih dipandang sebagai masalah sosial semata dan tidak memiliki konsekuensi ekonomi. Unit pemberdayaan perempuan cenderung kekurangan staf dan sumberdaya, serta tidak ditempatkan secara strategis dalam struktur pemerintahan. Organisasi organisasi masyarakat madani mempunyai peran penting untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas. Di beberapa wilayah, desentralisasi dikhawatirkan diikuti oleh bangkitnya kembali penafsiran yang konservatif terhadap agama mengenai peran gender dan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif.

Namun demikian, terdapat juga peluang-peluang yang menjanjikan. Beberapa pemerintah daerah telah mulai memandang perempuan sebagai pihak terkait yang penting dan secara aktif membuat program program untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Pemerintah daerah lainnya memanfaatkan media (talk show lewat radio dan sebagainya) untuk mempromosikan kepentingan perempuan. Penyerahan proses anggaran kepada pemerintah daerah dalam beberapa kasus membuka peluang bagi partisipasi lebih besar dari warga, termasuk perempuan, dan menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap gender. Banyak pemerintah daerah telah memperlihatkan kemauan politik untuk mengadopsi proses pembuatan kebijakan secara partisipatif, mengarusutamakan gender dan mengembangkan kapasitas melalui pelatihan mengenai masalah-masalah gender untuk para pejabat pemerintah daerah

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan

sehingga semakin menurun. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan antara lain :

- a. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang rendah
- b. Usia peserta KB yang relatif tua
- c. Usia rata-rata wanita kawin pertama menurun

2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Secara umum memang terjadi Penurunan TFR antara lain karena meningkatnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur. Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Dengan demikian angka prevalensi perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum

memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

4. Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk.

Usia kawin pertama yang rendah juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi penduduk, terutama pendidikan. Di samping itu sebagian kelompok masyarakat dan keluarga belum menerima dan menghayati norma keluarga kecil sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

5. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

Kabupaten Solok telah mulai melaksanakan pembangunan yang beorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dalam hal KB. Namun demikian, partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah yaitu sekitar 2 persen. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

6. Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB.

Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. Sesuai dengan kesepakatan internasional, ICPD (*International Conference on Population and Development*) 1994, pada tahun 2015, semua pelayanan kesehatan primer harus dapat melayani KB. Di samping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang.

7. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.

Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Pada gilirannya, kemiskinan akan semakin memperburuk keadaan sosial ekonomi keluarga miskin tersebut. Demikian pula, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaanketahanan keluarga, terutama pembinaan tumbuh-kembang anak, masih lemah. Hal di atas akan menghambat pembentukan keluarga kecil yang berkualitas.

8. Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB.

Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan keluarga berencana adalah desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, bahwa sebagian kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah kabupaten/kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak reproduksi penduduk. Pemahaman bahwa pelayanan KB merupakan salah satu hak azasi manusia, yaitu hak rakyat untuk mengatur proses reproduksinya, masih rendah. Pembangunan KB juga belum dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Komitmen Kabupaten Solok dalam Program KB belum diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk mendukung operasional lini lapangan. Jumlah dan kualitas petugas lapangan menurun, karena PLKB lama dimutasi ke tempat lain, penggantian dengan CPNS baru tidak seperti yang diharapkan sehingga ratio PLKB/nagari masih jauh dari 1 PLKB per nagari.

9. Gender dan Desentralisasi

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas.

10. Suara Perempuan dalam Politik dan Pembuatan Keputusan

Di masa Orde Baru, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia sangat rendah. Tahun-tahun belakangan telah terlihat adanya perubahan, khususnya dalam pemilu 2004. Kuota lunak 30% telah diberikan bagi perempuan dalam perekrutan anggota partai politik. Walaupun tidak semua partai politik memenuhi target dan tidak ada yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari lelaki dalam daftar partai, wacana tentang perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan telah mencapai tingkatan yang baru. Sebagai hasilnya, terdapat sedikit kenaikan jumlah perempuan yang terpilih untuk jabatan politik. Ini baru permulaan, namun jalan panjang masih terbentang. Tantangan yang signifikan adalah terbatasnya pelatihan dan pengalaman politik dari banyak perempuan yang bersaing dalam berbagai pemilihan. Persepsi peran perempuan dalam masyarakat juga merupakan penghambat. Dewan Perwakilan Rakyat hanya diisi oleh 11% perempuan (62 dari 549 anggota) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perempuan hanya mengisi 21% dari posisi yang ada (27 dari 128) dan Indonesia tidak memiliki gubernur perempuan.

11. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan telah merusak banyak kehidupan. Terlepas dari cedera fisik langsung, korban kekerasan juga

menderita cacat emosional dan psikologis yang lebih sulit untuk ditangani. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, (i) kekerasan dalam rumah tangga, (ii) kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan paskakonflik, serta (iii) perdagangan manusia. Perdagangan manusia berhubungan erat dengan migrasi tidak resmi dan mempengaruhi banyak perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai tenaga kerja. Dengan alasan-alasan yang nyata, bentuk perbudakan moderen ini sangat sulit untuk didokumentasikan, namun terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa isu ini merupakan masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi ketimbang masalah publik. Tantangan kedua adalah sumberdaya dana dan manusia yang digunakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan pada umumnya tidak memadai untuk memastikan bahwa para korban dapat diberikan bantuan yang mereka butuhkan dan yang menjadi hak mereka.

2.3.3. Formulasi isu-isu penting dan catatan strategis untuk perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan

Secara umum DPPKBP3A telah merumuskan permasalahan pembangunan keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

A. Urusan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum maksimal
2. Kurangnya SDM Penyuluh KB
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan / klinik pelayanan KB
4. Belum maksimalnya kegiatan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga akseptor KB
5. Belum maksimalnya Pelaksanaan Bina Keluarga Balita, Kampung KB dan Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dan Penurunan TFR.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
2. Minimnya fasilitas umum ramah anak.
3. Belum tersedianya data yang representative tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PPKB dan P3A di Tingkat Kabupaten berfungsi dalam pengejawantahan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Solok. Dengan mempertimbangkan hal di atas, penyusunan Renja DPPKBP3A Tahun 2019 ini mesti dengan cermat mengakomodir program-program dan kegiatan yang bisa mewujudkan keinginan tersebut sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan /prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan Tahun 2020 yang akan dilakukan oleh SKPD dibandingkan dengan Rancangan RKPD Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel II 2.4
Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Solok

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Program Dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program Dan Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				526.574.835	Pelayanan Administrasi perkantoran				742.824.835	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1.200.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya jasa mKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	26.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Tersedianya Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	1 Tahun	26.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	42.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	30.250.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Bermotor	1 Tahun	40.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	-	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1.800.000	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1.800.000	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKBP3A	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	30.802.585	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKBP3A	Tersedianya belanja Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	30.802.585	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	14.000.000	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	14.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3.000.000	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	3.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKBP3A	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	-	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKBP3A	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	1 Tahun	26.060.000	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	30.250.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	145.700.000	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Tahun	176.922.250	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	200.000.000	

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				353.640.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				357.140.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	121.420.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	121.420.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	225.720.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	225.720.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	6.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	10.000.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000	
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	DPPKBP3A	Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	15.575.000	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	DPPKBP3A	Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	30.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				130.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				125.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPPKBP3A	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPPKBP3A	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	50.000.000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPPKBP3A	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	8 Dokumen	54.872.950	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPPKBP3A	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	8 Dokumen	75.000.000	
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				18.700.000	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				50.000.000	
	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP3A	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan Gender pada SKPD	26 SKPD	18.700.000	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP3A	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan Gender pada SKPD	26 SKPD	50.000.000	
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				111.890.000	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				111.890.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak di Daerah	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	62 Orang	27.090.000	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak di Daerah	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	62 Orang	27.090.000	
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	DPPKBP3A	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	84.800.000	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	DPPKBP3A	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan Gender pada SKPD	100%	84.800.000	
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				368.090.000	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				368.090.000	
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Organisasi Perempuan	1 Tahun	320.000.000	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Organisasi Perempuan	1 Tahun	320.000.000	
	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab. Solok	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	2 Nagari	20.850.000	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab. Solok	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	2 Nagari	20.850.000	

8	Program Keluarga Berencana				4.315.790.000	Program Keluarga Berencana				4.315.790.000	
	Pelayanan KIE	Kab. Solok	Terlaksananya Pelayanan KIE	1 4 Kecamatan	81.050.--	Pelayanan KIE	Kab.Solok	Terlaksananya Pelayanan KIE	1 4 Kecamatan	100.050.000	
	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	14 Balai Penyuluh	3.666.220.000	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	14 Balai Penyuluh	3.666.220.000	DAK Non Fisik
9	Program Pelayanan Kontrasepsi				99.250.000	Program Pelayanan Kontrasepsi				99.250.000	
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Solok	Terlaksana pemasangan Kontrasepsi	7.000	99.250.000	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Solok	Terlaksana pemasangan Kontrasepsi	7.000	99.250.000	
10	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri				104.690.000	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri				104.690.000	
	Pendataan Keluarga	Kab. Solok	Tersedianya Data Basis Keluarga	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan Keluarga	Kab. Solok	Jumlah Dokumen Data Basis Keluarga Yang Akurat	1 Dokumen	50.000.000	
13	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				37.000.000	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				37.000.000	
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	14 kecamatan	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	14 Kecamatan	37.000.000	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	14 kecamatan	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	14 Kecamatan	37.000.000	
14	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				1.141.350.000	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				1.141.350.000	
	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Kab. Solok	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Kerja PKB	5 Paket	1.104.000.000	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Kab. Solok	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Kerja PKB	5 Paket	1.104.000.000	DAK Fisik
	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Kab. Solok	Tercapaiannya Forum Pelayanan KRR bagi remaja	35 Orang	37.350.000	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Kab. Solok	Tercapaiannya Forum Pelayanan KRR bagi remaja	35 Orang	37.350.000	
15	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				200.090.000	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				200.090.000	
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab. Solok	Terfasilitasi pertemuan rutin kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, Terbentuknya Kampung KB	14 Kecamatan, 19 Kampung KB	200.090.000	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab. Solok	Terfasilitasi pertemuan rutin kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, Terbentuknya Kampung KB	14 Kecamatan, 19 Kampung KB	200.090.000	
	JUMLAH				7.451.077.500	JUMLAH				7.335.322.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Solok dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disamping itu Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2020 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Di Indonesia isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

Melalui visi Penduduk Tumbuh Seimbang 2017, pemerintah berkeinginan mengendalikan kuantitas penduduk yang saat ini dirasa

sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan jumlah penduduk 366.213 juta jiwa menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Indonesia tidak hanya menduduki ranking empat dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 1,49 persen per tahun atau dalam hitungan absolut terdapat penambahan sekitar 4 juta jiwa per tahun yang kurang lebih setara dengan jumlah penduduk Singapura pada saat ini. Keinginan ini ditandai dengan penetapan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Renstra Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Tahun 2010-2014, yakni terkendalinya jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang ditandai *Total Fertility Rate* (TFR) = 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1.

Sudah barang tentu perhatian pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas penduduk saja, tetapi juga menyangkut kualitas. Hal ini tercermin dari salah satu misi pembangunan KB saat ini yakni mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang saat ini belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara ekonomi masuk akal. Mengarusutamakan masalah-masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika gender.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan RENJA juga memperhatikan Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat sesuai isu-isu strategis yang aktual saat ini, tanpa mengabaikan skala prioritas isu-isu terkait yang sesuai dengan kondisi dan situasi Kabupaten Solok saat ini. Penyusunan Rencana Kerja ditujukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Dalam kurun waktu satu tahun kedepan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Rencana Strategis secara keseluruhan.

Penetapan strategi yang akan dilakukan untuk menjawab pelaksanaan program Tahun 2020 dengan terlebih dahulu mengevaluasi dan menganalisis berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Arah Kebijakan DPPKBP3A Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Grand Design Dengan Pembangunan Kependudukan.
2. Meningkatkan Capaian Kabupaten Layak Anak.
3. Optimalisasi Pencegahan dan penanganan Perlindungan Anak.
4. Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga.
5. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan dan Jangkauan KBKR.
6. Meningkatkan Kemandirian PUSdalam ber-KB.
7. Meningkatkan Kesenjangan dan Keadilan Gender melalui Kebijakan dan Program Yang Memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki.

8. Mengoptimalkan pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter.

3.3. Program Dan Kegiatan

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada Tahun 2021 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2021.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKBP3A Tahun 2021 yaitu :

- **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Program Perlindungan Perempuan
 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - **Keluarga Berencana Dan Kesejahteraan Keluarga**
 1. Program Pengendalian Penduduk
 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 4. Bidang Sekretariat**
1. Program Penunjang Pemerintahan kabupaten/Kota

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan beserta kebutuhan dana (pagu indikatif) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja DPPKBP3ATahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Solok**

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

76uuuuuuuu
uuuuuuuuuu
uUAA899Ha
laman 1

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	DPPKBP3A	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	2,51 %	4.887.276.144	APBD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	5.328.280.109
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBP3A	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokuemn	166.121.200	APBD		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.005.200
	Sub Kegiatan Penyusunan Dkumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBP3A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun	6 Dokumen	34.086.000	APBD		Sub Kegiatan Penyusunan Dkumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	45.680.000	APBD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.650.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	86.355.200	APBD		Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.355.200
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPPKBP3A	Jumlah penyediaan administrasi keuangan perangkat Daerah	45 Orang	3.850.242.909	APBD		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4002.474.409

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik	45 Orang	3.850.242.909	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000
	Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	APBD		Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.231.500
	Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	DPPKBP3A	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	21.900.000	APBD		Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	25.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPPKBP3A	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	21.900.000	APBD		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPPKBP3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor yang disediakan	6 Paket	359.723.473	APBD		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.589.500
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBP3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor yang disediakan	6 Paket	3.997.500	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.997.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	4 Pakat	68.131.673	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBP3A	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	40,028.950	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	DPPKBP3A	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	16.973.350	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	17.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	230.592.000	APBD		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.592.000

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Paket	359.723.473	APBD		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.589.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Lembar	1.200.000	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Tagihan	25.538.736	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	26.538.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Unit	19.880.000	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.900.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	1.800.000	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	DPPKBP3 A	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	440.869.826	APBD		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	475.869.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	DPPKBP3A	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dinayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	271.650.000	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	275.650.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBP3A	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	4 Paket	169.219.826	APBD		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.219.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPKBP3A	Persentase ARG pada APBD	0,0124 %	46.570.100	APBD		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	56.058.300
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3 A	Jumlah SKPD/ Lembaga yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	18 SKPD	46.570.100	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.058.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	18 SKPD	46.570,100	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	56.058.300

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPKBP3A	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,0002 Rasio	386.753.500	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.135.750
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	DPPKBP3A	Persentase Layanan Pengaduan bagi Korban KTP/A Yang Dilayani	100 %	98.365.650	APBD		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	95.135.750
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	DPPKBP3A	Jumlah perempuan Korban Kekerasan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan	100 %	40.305.650	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	45.135.750
	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	DPPKBP3A	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota	100 %	58.060.000	APBD		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Organisasi Yang Dibina	8 Organisasi Perempuan	288.387.850	APBD		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000
	Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	DPPKBP3A	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	8 Organisasi Perempuan	288.387.850	APBD		Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	140.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DPPKBP3A	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi Keluarga	100 %	59.525.810	APBD		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	58.907.500
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Nagari	59.525.810			Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.907.500

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasidan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Nagari	59.525.810	APBD		Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasidan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota -	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Nagari	-	APBD		Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	58.907.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM DATA GENDER DAN ANAK	DPPKBP3A	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	1 Dokumen	13.681.050	APBD		PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM DATA GENDER DAN ANAK	17.741.000
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Dokumen	13.681.050	APBD		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.741.000
	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	13.681.050	APBD		Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	17.741.000
	PROGRAM PEMRENUHAN HAK ANAK(PHA)	DPPKBP3A	Cakupan Kabupaten Layak Anak	650 Angka	80.295.600	APBD		PROGRAM PEMRENUHAN HAK ANAK(PHA)	66.235.350
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Kecamatan	49.169.500	APBD		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	41.235.350
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Meida dan dunia Usaha	3 Kecamatan	49.169.500	APBD		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	41.235.350

	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk							Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah PIK Remaja dan Kelompok sebaya diluar sekolah yang difasilitasi	29 PIK R	62.750.000	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	64.000.000
	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidik Formal dan Non Formal	DPPKBP3A	Jumlah Jambore Saka Kencana yang di ikuti	1 Kegiatan	45.919.000	APBD		Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidik Formal dan Non Formal	40.938.500

	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Pelaksanaan Pendataan Keluarga Jumlah Pelaksanaan Pendataan Keluarga	14 Kecamatan	130.121.000	APBD		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBP3A	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	70.121.000	APBD		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	70.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKBP3A	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	14 Laporan	60.000.000	APBD		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	60.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBP3A	Ratio Akseptor KB	74.33 %	4.577.668.530	APBD		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.728.296.460
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBP3A	Jumlah Pembinaan PKB/PLKB, PPKBJ dan Sub PPKBJ	14 Kecamatan	1.345.954.322	APBD		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.207.376.460
	Sub Kegiatan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Kegiatan	DPPKBP3A	Jumlah Pelayanan KIE pada Kecamatan	14 Kecamatan	131.746.500	APBD		Sub Kegiatan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Kegiatan	60.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DPPKBP3A	Jumlah Penyediaan Sarana KIE Program KKBPK	1 Paket	186.338.200	APBN		Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	119.506.838

	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBP3A	Jumlah Balai Penyuluh Yang Terpenuhi Operasional dan sarana	14 Balai Penyuluh	1.027.869.622	APBN		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.027.869.622
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DPPKBP3A	Jumlah Biaya Operasional Bagi Kader	14 Kecamatan	355.200.000	APBN		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	250.000.000
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBP3A	Jumlah Biaya Operasional bagi Kader	14 Kecamatan	250.000.000	APBN		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	355.200.000
	Kegiatan Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP3A	Jumlah Balai Penyuluh Yang Dipenuhi Operasional dan Sarana	54 Klinik KB	2.166.658.208	APBN		Kegiatan Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.564.064.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBP3A	Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Faskes	54 Klinik KB	134.064.000	APBN		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	134.064.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBP3A	Jumlah akseptor, jumlah rencana alkot dan pelayanan kontrasepsi KB di Faskes serta jumlah Pasca MOP dan MOW	5000 Akseptor	940.704.208	APBD dan APBN		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBP3A	Jumlah Balai Penyuluh yang dipenuhi Operasional dari Sarana	14 Balai Penyuluh	1.091.890.000	APBN		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	930.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKBP3A	Jumlah Sosialisasi di Kampung KB	32 Kampung KB	709.856.000	APBN		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	709.856.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBP3A	Jumlah Locus Yang Diberikan Sarana	10 Locus Stunting	709.856.000	APBN		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	706.856.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan	DPPKBP3A	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung KB	32 Kampung KB	607.400.000	APBN		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	607.400.000

	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)							Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DPPKBP3A	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	0%	887.400.000	APBN		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	888.297.560
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL , PPPKS, Pik-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	DPPKBP3A	Jumlah Locus Yang Diberikan Sarana	10 Locus Stunting	280.000.000	APBN		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL , PPPKS, Pik-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	280.897.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	DPPKBP3A	Jumlah Sosialisasi tentang Anak Stunting pada 1000 HPK	42 Daerah Stunting	607.400.000	APBN		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	607.400.000
	JUMLAH				11.406.524.734				10.652.665.529

BAB IV

P E N U T U P

Sumber dana realisasi tahun anggaran 2021 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis. Dengan mempedomani renstra dan rencana kerja 2021 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah serta dengan melihat pemangku kepentingan lainnya sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Solok. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate sama dengan satu ($NRR = 1$) akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di Indonesia hanya 2 orang anak. Kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2021 ini. Semoga terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok.


Kepala DPPKBP3A
ZULFI MI, SH. MM
Nip. 19660325 199402 1 001